KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI				H.4 X	Final	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	H.2 X Pembetulan Ke-	0 H.3 Pembatala	ın	H.5	Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG						
A.1 NPWP : 7 9 8 9 3 2 3 3 1 7 2 8 0 0 0						
A.2 NIK :						
A.3 Nama : NISRINA ULFAH, AMD.KEP.						
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG			TARIF LEBIH		I	
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
5 21-402-01	8.855.000	8.855.000	0	5	442.750	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota						
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 04822/LS-TJ/RSJD.AHM/2022						
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 1 1 dd 0 5 mm 2 0 2 2 yyyy						
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.						
Nomor: Tanggal dd mm yyyyy						
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :						
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :						
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK						
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : C.2 Nama Instansi Pemerintah :	9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 0  RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
C.3 ID Subunit Organisasi :						
C.4 Tanggal .	1 1 dd 0 5 mm	2 0 2 2 yyyy				
C.5 Nama Penandatangan :	RIANDY	2 0 2 2 3				
C.6 Pernyataan Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan ba	ahwa bukti Pemotongan/Pemungu	tan Unifikasi telah sa	ya isi dengan	benar dan telah saya	
	tandatangani secara elektronik.					
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.						

3AO1OMWJ